

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DI KECAMATAN HELUMO KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**Oleh
SUPRANDI AIYADI
NIM
S2117046**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna meperoleh gelar sarjana di
universitas ichsan gorontalo**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Oleh

SUPRANDI AIYADI

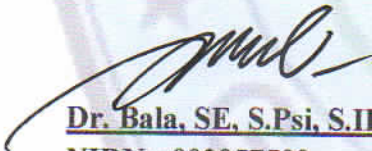
S2117046

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana dan telah disetujui oleh tim pembimbing
pada tanggalGorontalo, September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bala, SE, S.Psi, S.IP., M.Si
NIDN : 002057502


Achmad Risa M.S.Sos., M.Si
NIDN : 0923079004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI
KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN**

Oleh
SUPRANDI AIYADI

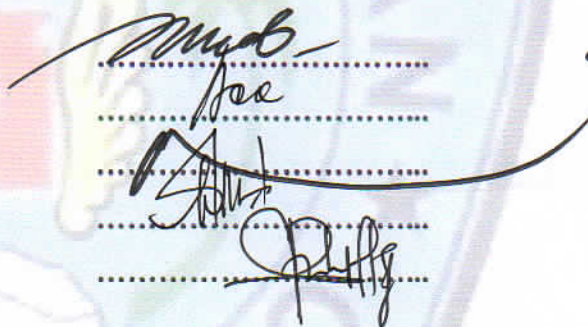
S2117046

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan

1. Dr. Bala, SE, S:Psi, S.IP., M.Si
2. Achmad Risa M, S.Sos., M.Si
3. Dr. Arman. S.Sos., M.Si
4. Darmawaty Abd Razak.,S.IP., M.AP
5. Sandi Prahara, ST., M.Si



Mengetahui

**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Dr. Arman. S.Sos., M.Si
NIDN: 0913078602

**Ketua Program
Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Darmawati Abdul Razak., S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SUPRANDI AIYADI
NIM : S2117046
JUDUL SKRIPSI : Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya. Skripsi ini sepenuhnya karya sendiri tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Gorontalo, 21 November 2021
Buat Pernyataan

Suprandi Aiyadi
S2117046

10000
METERAI TEMPEL
1079CAJX564308932

ABSTRACT

SUPRANDI AIYADI. S2117046. THE COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN THE ELECTION OF REGIONAL HEAD AND DEPUTY HEAD IN THE HELUMO SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

This study aims as, 1) to find out the community political participation in the 2020-2025 elections in the Helumo Subdistrict of the South Bolaang Mongondow District, 2) to analyze the political participation of the community in the 2020-2025 elections in the Helumo Subdistrict of the South Bolaang Mongondow District. the research method used is qualitative. The data collection used is observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study are: 1) the level of political participation has differences, namely the level of public participation is less in 2015, but more increased in 2020, and 2) the factors that cause the increased public participation in the elections in Helumo Subdistrict, South Bolaang Mongondow is the strong hope of the community towards a pro-people leader.

Keywords: political participation, regional election

ABSTRAK

SUPRANDI AIYADI. S2117046. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2020-2025 di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2) menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2020-2025 di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) tingkat partisipasi politik memiliki perbedaan, yaitu tingkat partisipasi masyarakat kurang pada tahun 2015, tetapi lebih meningkat pada tahun 2020, dan 2) faktor yang menyebabkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah adanya keinginan masyarakat yang sangat besar terhadap pemimpin pro-rakyat.

Kata kunci: partisipasi politik, pilkada

Motto

الوقت كالسيف إن لم تقطعده قطعك

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” (H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama penulis menuntut ilmu :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih nya serta membesarkan dan mendidik penulis sampai akhirnya bisa menyelesaikan S1
2. Kepada keluarga besar ku yang tercinta dan adik-adik keponakan ,yang telah memberikan senyum semangat dan motivasi lebih untuk penulis.Untuk Arisetianingsih yang selalu memberikan semangat selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk angkatan 2017 yang selalu menyemangati satu sama lainnya selama penulis menempuh pendidikan dan belajar

bersama sahabat-sahabat semua nya dan khusus nya teman-teman Bolaang Mongondow Selatan seangkatan dan satu perjuangan trimakasih bayak selalu memberikan dukungan kepada penulis.serta untuk adik-adik tingkat yang memberikan motivasi dan senyum semangat.nya

4. Untuk sahabat-sahabat senior Di Universitas Icshan Gorontalo yang selalu memberikan hiburan canda dan tawa, kemenangan dan kekalahan bersama,

Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahannya, hal ini diharapkan saran dan kritik dari pembaca sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih baik dan lebih sempurna.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya pada Jurusan ilmu pemerintahan

Bolaang Mongondow Selatan, Juli 2021

Penulis,

Suprandi Aiyadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karea atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul; **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALAH DAERAH DI KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**,sesuai dengan yang rencanakan. Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skipsi.penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, usulan penelitian ini tidak dapat penulisan selesaikan. Oleh itu penulisan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tau tercinta ibunda Tasmin Muhamad dan ayahanda Ambrin Aiyadi, kakaku-kakaku serta adikku yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga saat ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku kutua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr.ARMAN, S.Sos. M.Si, selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Darmawaty Abd.Razak, S.IP.,M.AP,selaku ketua program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Icshan Gorontalo.

6. Bapak Dr. Bala Bakri, S.IP.,SE.,S.Psi.,MM, selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian.
7. Bapak Ahmad Reza Mediansyah, S.Sos.,M.Si, selaku pembimbing II, yang telah mengerjakan usulan penelitian ini.
8. Ibu Sandy Prahara ST., M.Si selaku pembimbing akademik.
9. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, juli 2020

Suprandi Aiyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	10
1.4 Mamfaat penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian partisipasi politik	12
2.2 Prinsip-prinsip partisipasi politik masyarakat	27
2.3 Model dan Bentuk-bentuk partisipasi politik	28
2.4 Faktor-faktor partisipasi politik	31
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Sumbe Data.....	38

3.4 Informan	39
3.5 Teknik pengumpulan data	39
3.5 Analisi data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Lokasi penelitian	41
4.1.1 gambaran umum kecamatan Helumo	41
4.2 Hasil penelitian	41
4.2.1 Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah	43
4.2.2 Keunggulan dan Kekurangan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	52
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu syarat atas berjalannya demokrasi, dengan adanya pemilihan yang bebas dan berkala yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 05 tahun 2011 pada pasal 1 ayat (1) ialah, pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pemilu adalah sarana demokrasi untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang di alinea ke empat dalam undang-undang dasar tahun 1945.

Bergulirnya era reformasi seiring dengan tumbangnya orde baru dibawah pimpinan presiden soeharto membawa perubahan yang signifikan dalam perpolitikan indonesia dalam sebuah sistem demokrasi. Ini terjadi setelah naiknya BJ Habibie sebagai pengganti soeharto yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden republik indonesia. Perubahan yang sangat mendasar dalam peta perpolitikan indonesia terutama terjadinya liberalisasi politik.

Liberalisasi ini bukan dilakukan secara murni oleh habibie tetapi lebih kepada sebuah keterpaksaan dari pihak oposisi. Ada beberapa kebijakan “mulia” yang dilakukan oleh mantan menristek ini. Pertama melaksanakan pemilihan umum secara

demokratis (jujur dan adil), pembebasan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol), kebebasan pers serta pembubaran dwi fungsi Abri.

Dalam konteks pemilihan umum pemerintah Habibie mengeluarkan keputusan No. 5/1998 dan No.12/1998 yang memberikan garansi formal bagi netralistik pegawai negeri. Munculnya beberapa aturan baru dalam politik membawa perubahan besar dalam partai politik. Di bawah kekuasaan Habibie lahir ratusan partai politik yang ingin terlibat dalam pemilu. Tetapi hanya berhak hanya 48 partai yang boleh ikut termasuk partai Golkar dengan urutan 23.. Munculnya partai baru membawa euforia kepada warga negara Indonesia setelah Soeharto tumbang dari tampuk kekuasaan tunggal dan rakyat bebas menentukan sikap untuk memilih dan memberikan jaminan dalam penggunaan hak suara tanpa intimidasi dan diskriminasi.

Walaupun belum sempurna dan masih jauh dari yang diharapkan, perubahan ke arah demokrasi sudah semakin nampak. Cuma perlu pembenahan dan infrastruktur pendukung. Terjadinya perpindahan kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie, tuntutan dan gejolak bukan semakin mereda. Tetapi terus terjadi dan mendesak BJ Habibie segera melakukan pemilihan umum. BJ Habibie masih terbelah sebagai keturunan masa orde baru dan perpanjangan tangan dari Soeharto. Sehingga sangat sulit untuk melakukan reformasi total terutama terhadap sistem perpolitikan. Melalui sidang istimewa MPR 1998 dihasilkan sebuah keputusan untuk melaksanakan pemilihan sebagai alternatif yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999.

Keinginan rakyat untuk mempercepat pelaksanaan pemilu terjadi berbagai pandangan dan pendapat dari pro demokrasi dengan pro pemerintah. Pro demokrasi

menganggap percepatan pelaksanaan pemilu merupakan sebuah alternatif dalam jeda demokrasi. Sedangkan pro pemerintah beranggapan pemilu seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 karena masa jabatan BJ Habibie selaku penerus mandat dari Soeharto mempunyai jabatan 5 tahun semenjak ditetapkan hasil pemilu tahun 1997. Pro pemerintah menyatakan bahwa lebih memfokuskan diri untuk membenahi krisis ekonomi serta melakukan reformasi diberbagai bidang.

Pemilu merupakan wujud demokrasi yang dimana pemilu adalah salah satu ciri implementasi dalam demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemilu untuk menentukan arah dan kebijakan politik di suatu negara untuk mewujudkan keinginan rakyat dalam memilih wakil rakyat dilembaga legislatif dan memilih lembaga eksekutif, baik itu presiden dan wakil presiden atau kepala daerah maupun gubernu/wakil, bupati/wakil. Dalam perwujudan demokrasi di tingkat lokal ialah dengan melaksanakan pilkada di setiap daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang di pilih secara langsung oleh masyarakat dengan ini rakyat diberi kebebasan dalam memilih kepala daerah daerahnya selam lima tahun kedepannya.

Salah satu tuntutan dari pro pemerintah tersebut adalah mendesak melaksanakan pemilu pada tanggal 7 juni tahun 1999. Pemilu tahun 1999 ini diikuti oleh 48 partai politik dengan aliran dan ideologi yang berbeda. Bahkan ada juga partai uni demokrasi indonesia (PUDI) pimpinan sri bintang pamukas yang pernah menjadi tahanan politik era soeharto karena dianggap membangkang Pemilu tahun 1999 berada dari pemilu sebelumnya, partai politik bebas melakukan kampanye, pawai massa, ber

orasi serta mendapatkan massa yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi. Bahkan beberapa orang tokoh nasional juga mendirikan partai sendiri. Dari 48 partai politik 35 merupakan partai baru.

Pada umumnya, partai-partai baru itu berpandangan, pada akhir era orde baru, kondisi bangsa kian memprihatinkan, yang ditandai oleh (1) kegagalan dalam mengembangkan demokrasi kerakyatan dimana kebijakan pemerintah belum menyentuh kehidupan masyarakat paling bawah, (2) Kegagalan dalam penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia (HAM), (3) Terjadinya sentralistik dalam pemerintahan negara, sehingga segala sesuatunya hanya ditentukan oleh kemauan Presiden Soeharto, (4) kegagalan dalam mengelola sistem kepartaian, sehingga Golkar menjadi partai hegemonik, (5) kegagalan dalam sistem sosial-budaya yang ditandai oleh kegagalan sistem pendidikan nasional, Dan (6) last but not least, kegagalan dalam membangun sistem ekonomi, yang ditandai semakin melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi. (Widjanarko Puspoyo, 2012:283-284). Sebagai gambaran rill,

Pemilu 1999 pemenangannya PDI-P Meraih 35.689.073suara (33,74%), memperoleh 153 kursi DPR, Partai Golkar memperoleh 23.741.758 suara (22,44%) mendapat 120 kursi DPR, Partai Kebangkitan bangsa (PKB) memperoleh 13.336.982 suara (12,61%), mendapat 51 kursi DPR, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 11.329.905 suara (10,71%) mendapatkan 58 kursi DPR atau kehilangan 31 kursi dibanding pemilu 1997, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pendatang baru meraih 7.528.856 suara (7,12%) mendapat 34 kursi DPR. Di luar lima besar partai-partai itu, partai lama yang masih eksis adalah Partai Penegak

Demokrasi Indonesia (PPDI) sebelumnya bernama PDI, suara merosot tajam hanya meraih 2 kursi DPR, kehilangan 9 kursi dibanding pemilu 1997. (Widjanarko Puspoyo, 2012:288-289). Kursi parlemen yang biasanya oleh tiga partai politik, Abri, utusan daerah dan utusan daerah (non fraksi), kini sudah diisi oleh aneka ragam partai politik dengan ideologi dan visi yang berbeda. Inilah sebuah prestasi yang prestisius yang dilahirkan oleh kebijakan BJ Habibie.

Berangkat dari situ, perjalanan demokrasi Indonesia semakin berbenah dengan melakukan berbagai perombakan terhadap sistem pemilu termasuk lahirnya peraturan pemerintah (PP) No 06 tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah hasil amandemen UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan aplikasi dari kata demokratis hasil amandemen UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) bahwa gubernur/ wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati di tingkat provinsi, kab/kota dipilih secara demokratis.

Lahirnya PP No. 06/ 2005 ini membawa kita pada sebuah arena perpolitikan yang dinamis dan bermutu. Sebab dengan keterlibatan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan politik melalui pemungutan suara diharapkan pemimpin yang dilahirkan benar-benar bermutu dan mempunyai loyalitas, profesional memiliki kapabilitas untuk memajukan daerahnya. Rakyat sebagai stakeholder dalam pemilihan kepala daerah (Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung) diharapkan mampu menjalankan amanah dan mempunyai peran penting untuk lebih menciptakan pemimpin yang betul-betul mampu menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan suatu daerah.

Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan pemilu ini tidak serta merta berarti proses demokrasi di Indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini diungkapkan oleh William Liddle yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi ditambah Liddle adalah menjadi sistem yang normal dalam kanca perpolitikan Indonesia sekarang ini (dalam Proyono, dkk, 2007:43-44). Salah satu demokrasi menurut John Locke (1632-1704) adalah prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain (Miriam Budiardjo, 2004: 151). Harus disadari bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan langkah maju dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, ia menjadi pilihan strategis setelah bentuk lain dari demokrasi itu sendiri sepanjang pemilu Indonesia. (Muhadam Labolo, 2010:128-129)

Di era modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun sosial yang menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalaninya. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang berlalu baik dari norma adat, budaya, agama, maupun hukum.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai pasal 110 No 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004 yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut dalam konteks eksplisit di muat dalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan di tambah petunjuk teknis melalui peraturan pemerintah No 6 tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya di sebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan atau kabupaten berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar (UUD) negara republik indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut pakar politik arbi sanit, ada tiga golongan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu (a) kepentingan elit politik nasional, (b) kepentingan elit politik lokal, dan (c) kepentingan rakyat kebanyakan. Beberapa daerah di indonesia yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara untuk jabatan Gubernur atau Bupati/Walikota menyisakan banyak catatan terhadap perkembangan dan keberlangsungan demokrasi Satu diantara pilar di sebutkan sanit adalah kepentingan rakyat tenggelam oleh dominasi kepentingan para elit yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut (dalam Priyono dkk, 2007:74).

Salah satu daerah kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu

tepatnya pada tanggal 09 Desember 2020 lalu. Pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini merupakan awal dari terciptanya demokratisasi dan budaya politik lokal dalam sistem perpolitikan tanah air di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan

Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidakpedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020

Berhubungan karena agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan momentum yang strategis dalam upaya mewujudkan demokratisasi di daerah, maka proses pemilihan kepala daerah tersebut semestinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses pemilihan kepala daerah di Kecamatan Helumo yang dilaksanakan 09 Desember Tahun 2020 yang lalu, penulis mengamati dilapangan masih diwarnai dengan berbagai dinamika dan fenomena yang dianggap dapat merusak nilai-nilai demokrasi ditengah kehidupan masyarakat di Kecamatan Helumo

Adapun fenomena yang penulis dapat setelah melakukan pengamatan saat pemilihan kepala daerah di Kecamatan Helumo antara lain:

Tahapan sosialisasi panitia pemilihan kepala daerah kepada masyarakat sehingga

informasi tentang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah masih ada yang tidak diketahui masyarakat. Masyarakat mengetahui visi dan misi masing-masing kandidat Kepala Daerah. Partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, hal ini penulis amati fakta masih besarnya jumlah masyarakat yang tidak ikut memilih/ tidak memberikan hak suaranya sewaktu pemilihan kepala daerah di Kecamatan Helumo berlangsung hanya diikuti 4251 orang dari 4390 orang daftar pemilih tetap. Masih adanya *black campaign* (Kampanye Hitam) hal ini dibuktikan dengan adanya pasangan kandidat saling menjatuhkan citra kandidat kepada masyarakat. Disisi lain penulis juga menemukan adanya unsur *Money Politic* (politik uang) yang dilakukan oleh calon kepala daerah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik serta perlu untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“ Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2020-2025 di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan “.!

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk bagaimanaMenganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2020-2025 di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.”!

1.1.4. Mamfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui Sebagai tambahan penulis dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang di dapatkan selama kuliah khususnya dibidang partisipasi politik masyarakat dalam pilkada (bupati dan wakil bupati).”!

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Thoha (2005:343), bahwa: “Partisipasi politik adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain”, pengambilan keputusan dalam politik adalah “seperangkat yang diambil individu atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan sebagai reaksi terhadap suatu masalah, masalah adalah suatu penyimpangan antara masalah dengan pemimpin.”

Menurut Keith Faus Partisipasi politik adalah “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan”. Damsar (2010:179) dengan demikian individu disini sangatlah berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Herbert McClosky Partisipasi politik adalah “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Damsar (2010:180)

Menurut Samuel P. Huntington Dan Joan M. Nelson Damsar (2010:180) Partisipasi politik adalah “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

Menurut Michael Rush Dan Philip Althoff Partisipasi politik adalah “Keterlibatan dalam

Batasan yang dikehendaki oleh Keith Faus serta Huntington dan Nelson memfokuskan pada suatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Fokus tunggal seperti ini mengabaikan bahwa politik itu tidak hanya dengan pemerintahan saja, tetapi luas dari itu, yaitu meliputi berbagai aspek Kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi.aktifitas politik pada suatu sistem politik”. Damsar (2010:180)

Batasan yang dikehendaki oleh Keith Faus serta Huntington dan Nelson memfokuskan pada suatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Fokus tunggal seperti ini mengabaikan bahwa politik itu tidak hanya dengan pemerintahan saja, tetapi luas dari itu, yaitu meliputi berbagai aspek Kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi.

Batasan yang dibuat oleh Herbert Mc Closky menekankan sesuatu yang tidak dicakup oleh ahli lain yaitu sifat sukarela. Itu berarti segala sesuatu peran serta yang bersifat selain sukarela seperti paksaan, keharusan atau kewajiban, melalui pandangan tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi. Misalnya ketika semua anggota dari suatu komunitas diharapkan untuk pergi secara bersama-sama ke kecamatan untuk mempertanyakan kebijakan yang tidak adil terhadap komunitas mereka. Ketika harapan pergi bersama

kekecamatan tersebut dipahami sebagai suatu kewajiban, seperti PNS diharapkan pilih Golkar pada masa rezim Orde Baru dimasa lampau, maka kegiatan seperti ini dipandang sebagai mobilisasi, bukan partisipasi. Jadi ditekankan sekali bahwa yang sering digunakan oleh para ahli tentang peran serta yang bersifat paksaan, keharusan, atau kewajiban dikenal sebagai mobilisasi.

Ketika suatu komunitas, mewajibkan warganya untuk memberikan sumbangan terhadap kepentingan publik, maka konsep sumbangan secara substansial adalah sesuatu yang bersifat sukarela berubah menjadi suatu aktivitas yang memaksa. Oleh sebab itu sumbangan wajib warga dari suatu komunitas tidak bisa dikategorikan sebagai partisipasi dalam kegiatan publik pada komunitas, namun lebih tepatnya sebagai mobilisasi kegiatan publik.

Apa yang dikemukakan oleh Herbert McClosky tentang karakteristik suarela dalam konsep partisipasi diatas sangat dipahami oleh Huntington dan Nelson. Untuk menemukan titik temu perbedaan konsep antara yang setuju dan tidak adanya karakter sukarela, maka Huntington dan Nelson mengusulkan dua konsep partisipasi, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Partisipasi otonom menunjukkan partisipasi yang dilakukan secara sadar tanpa tekanan dan sukarela. Sedaangkan partisipasi mobilisasi menunjukkan sisi yang berseberangan dari yang dijelaskan pertama, yaitu tidak sadar, ada tekanan, atau ada unsur paksaan, sekecil apapun ia. Damsar (2010:181-182)

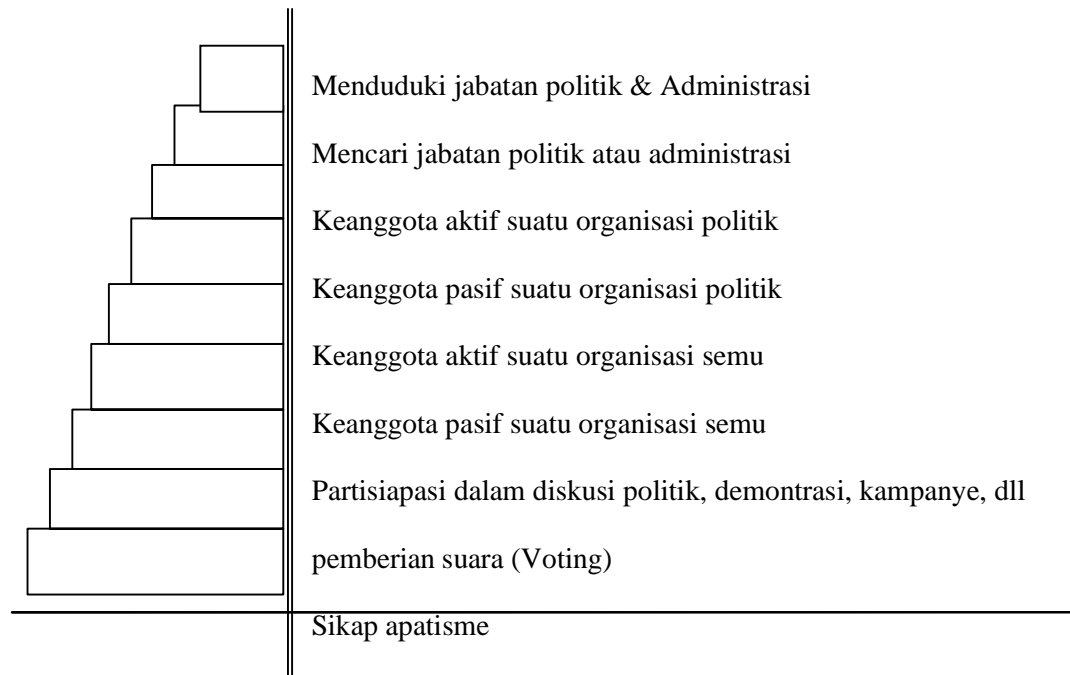
Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi

politik. Didalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagaimana tindakan- tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah, dan bukan sekedar sekali-kali mengajukan petisi minta bantuan terhadap tekanan dari luar sebaliknya , prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah diterima dan ditekankan disemua negara industri yang modern, meskipun bentuk dan kodrat partisipasinya yang sah menunjukkan perbedaan-perbedaan yang besar satu sama lain.

Proses-proses yang dilalui untuk memperluas partisipasi, termasuk keseluruhan kekuasaan-kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi partisipasi dan juga saluran-saluran partisipasi yang lebih khusus yang mungkin menggerakkan individu-individu dan golongan-golongan yang tadinya berpartisipasi. Dalam jangka panjang, modernisasi sosial dan ekonomi menghasilkan partisipasi yang lebih luas. Akan tetapi proses-prosesnya tidak mantap, seragam atau tidak dapat diubah lagi. Beberapa negara memiliki tingkat-tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi dari pada apa nampaknya dapat dibenarkan oleh tahap-tahap perkembangan sosial, ekonomi mereka. Di negara-negara lain tingkatnya jauh lebih rendah. Demikian pula halnya dengan golongan-golongan didalam negara-negara itu. Selain dari itu,

tingkat partisipasi di dalam golongan atau negara-negara dapat merosot dengan tajam dan bentuk-bentuk partisipasi dapat berubah secara dramatis. Hubungan antara pertumbuhan atau modernisasi dan partisipasi politik adalah kompleks dan melalui sejumlah faktor tambahan. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990:1-2)

Menurut Ragamalan Rafael (2001:147), bahwa: Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik yang berjalan”. Menurut Rush dan Althoff (2002) untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat pada kegiatan politik dapat dilihat berdasarkan hirarki partisipasi politik yang diikuti oleh masyarakat. Hirarki partisipasi politik bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1 : Hirarki Partisipasi politik

Suber: Rush dan Althoff 2002, (Prof.Dr Damsar 2010:185)

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althof diatas dapat kita asumsiakan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya kebawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah di amati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah di pilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kab/ kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat

menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umum nya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang di pilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat.

Miriam Budiardjo (2008:367), Partisiapasi politik “adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy)”.

Kait dan Halz-Bach, “Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan politik”. Hendry Subiakto, Rachmah Ida (2012: 64).

Menurut Rosemberg Mensugestikan tiga alasan politik untuk menerangkan apati politik. *Alasan pertama* adalah konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: Individu dapat merasa, bahwa aktifitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek hidupnya. Umpamanya dia dapat mempercayai bahwa aktivitas politik itu dapat mengasingkan kawan dan para tetangganya, atau bahkan anggota keluarganya iameraasa bahwa posisi sosialnya bisa terganggu rusak, atau aktivitas politik dapat mengancam posisi pekerjaan karena terlalu dekat dengan satu partai atau pandangan tertentu atau dia dapat merasa bahwa aktivitas politik dapat mengancam atau merusak kehormatan dirinya dengan jalan mengungkapkan sebagai kebodohan sendiri, ketidak imbangan dan

ketidak mampuan. Karena itu pada umumnya individu dihadapkan terhadap kontroversi atau tekanan-tekanan silang, maka ia beranggapan bahwa ketidak aktifan politik lebih cocok dari pada aktivitas politik.

Alasan Kedua bahwa individu dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sebagai individu tunggal, dia mungkin merasa bahwa dia sama sekali tidak mampu mempengaruhi jalannya peristiwa, dan bahwa kekuatan politik yang bersifat bagaimanapun juga ada diluar kontrol individu. Tambah lagi, dia dapat beranggapan, bahwa hasil aktivitas politik merupakan satu kesimpulan yang telah lampau, dan malahan merasa bahwa dengan menggabungkan diri dengan orang lain untuk mendapatkan suatu tujuan politik, adalah tidak berguna. Pada akhirnya, dia mungkin merasakan adanya suatu jurang pemisah antara ideal-idealnya dengan realitas politik, suatu pemisah sebagian besarnya, sehingga tidak ada sejumlah aktivitas politik yang kiranya bisa menjembatannya.

Alasan Ketiga seperti Milbart, Rosenberg beranggapan bahwa “*memacu untuk bertindak*” atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktifitas politik, dengan tidak adanya perangsang sedemikian itu dapat menambahkan perasaan apati. Individu mungkin merasa bahwa buah pikiran politik tidak terlalu menarik baginya, dan bahkan dapat memisahkan banyak kegiatan dari bidang politik, karena dia menerimanya sebagai hal yang lebih bersifat pribadi daripada politis. Selanjutnya dia mungkin merasa bahwa aktifitas politik menyajikan kepuasan sedikit atau kepuasan tidak

langsung, sedang hasil langsung yang diperoleh se pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan materil individu. Rush dan Althoff (2002:146-148)dikit sekali. Pokoknya partisipasi politik diterima sebagai hal yang sama sekali tidak layak bagi

Bentuk dan sifat partisipasi politik jelas berbeda dari satu sistem politik dengan yang lain, walaupun ada terdapat lembaga politik yang nyata sama, seperti adanya pemilihan atau partai politik. Kebanyakan negara demokrasi modern memiliki lingkungan sosial yang ditandai oleh sistem stratifikasi sosial yang ekstensif, namun relatif luwes, dan suatu lingkungan politik yang secara ideologis berusaha mendorong berlangsungnya partisipasi politik. Masyarakat primitif memberikan suatu lingkungan sosial dan lingkungan poliitik yang terintegrasi, dalam situasi mana perbedaan antara kegiatan politik dan aktifitas jenis lainnya kurang menonjol jika dibandingkan dengan kondisi yang dimasyarakat yang lebih maju. Masyarakat totaliter juga ditandai oleh integrasi dari kegiatan sosial dan aktifitas politik, namun tidak sama seperti masyarakat primitif, lingkungan politiknya secara ideologis lebih diutamakan dari pada lingkungan sosial. Masyarakat berkembang cenderung untuk mengeping-ngepingkan lingkungan sosial dan lingkungan politik, lingkungan sosialnya sering kali mendasarkan diri pada suatu sistem stratifikasi sosial-tradisional yang relatif kaku, yang oleh kekuatan modernisasi dicoba untuk dituruntuhkan. Hal ini merupakan basis bagi suatu lingkungan politik dalam mana lembaga-lembaga yang modern berlangsung

bersama-sama, dan tingkah laku politik ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang pada hakikatnya yang bersifat tradisional. Penjelasan mengenai tingkah laku politik individu pada umumnya, dan partisipasi politik pada khususnya tidaklah termasuk sulit untuk dikemukakan. S.M Lipset umpamanya dengan menggunakan sederetan studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan bagi gerakan-gerakan ekstrimis. Demikian pula studi voting yang mendalam di beberapa negara memberikan bukti yang kuat untuk mendukung satu jajaran luas dari hipotesa-hipotesa. Lebih khusus mengenai asosiasi antara status sosial-ekonomis dengan tingkah laku elektoral yang telah didokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian yang telah dicurahkan kepada individu yang menyimpang dari norma voting kelas. Studi ini mengemukakan bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar, dan oleh situasi khusus yang dihadapinya. Rush dan Althoff (2002: 178-180)

Menurut Huntington dan Nelson Partisipasi politik dapat terwujud dalam dalam berbagai bentuk studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda". Miriam Budiardjo (2010:367), namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut:

a. Kegiatan pemilihan

Kegiatan pemilihan merupakan keterlibatan masyarakat desa mekarsari dalam proses pemberian suara, keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil bupati), mengaktifkan masyarakat dalam menghimpun dan mencari dukungan suara untuk salah satu kandidat kepala daerah (bupati dan wakil bupati).

b. Menghadiri rapat umum

Keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan dan juga rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil bupati) di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

c. Mengadakan hubungan (*Contaction*)

Merupakan tindakan aktif masyarakat terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa dengan maksud memperoleh manfaat bagi salah satu tim sukses/ calon kepala daerah (bupati dan wakil bupati)

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan

(*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak akan lebih baik. Dalam implementasinya tinggi tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (miriam budiardjo).

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1) Keith fauls

Keith fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku opsisi terhadap pemerintah.

2) Hebrert McClosky dalam *international encyclopedia of the social sciences*

Hebrert McClosky (1972:252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

- 3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: political participation in developing countries*
- 4) Huntington dan Nelson (1997:3) partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.
- 5) Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung dengan cara konvensional atau bahkan dengan kekerasan ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikut-sertaan. Menurut Adams (2004:83) partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi politik, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.

Menurut Miriam (1998:3) partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

Dengan demikian sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberikan tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masala-masalah pemilu.

Menurut Davis (1997:76) pernyataan pikiran dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka agar menyumbangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab atas kelompoknya. Dari pengertian Davis tersebut, disimpulkan terdapat tiga

unsur penting yang dimiliki seseorang untuk mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik, yaitu: a) adanya pernyataan pikiran dan perasaan; b) adanya motivasi untuk berkontribusi; dan c) adanya tanggung jawab bersama,

Menurut Sulaiman dalam Sastropetro (1998:41), merumuskan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka;
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana;
- c. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
- d. Partisipasi dalam bentuk dukunga.

Jenis-jenis partisipasi politik menurut Sulaiman dalam sastropetro (1998:41) yaitu sebagai berikut:

- a. partisipasi pikiran (*psychological participation*);
- b. Partisipasi tenaga (*physical participation*);
- c. Partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*);
- d. Partisipasi keahlian (*participation with skill*);
- e. Partisipasi barang (*material participation*);
- f. Partisipasi uang/dana (*money participation*).

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau

pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Terbukanya saluran komunikasi politik sebagai wadah partisipasi politik menurut Alfian (1980:37) akan mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntunan, protes, dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke pusat pemrosesan sistem politik, dan hasil pemrosesan itu menjadi umpan balik (*feed back*) sistem politik.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Roth dan Wilson (1980:153), kegiatan partisipasi politik secara konvensional mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu (*voting*) menghadiri rapat umum (*campaign*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, atau anggota parlemen.

2.2 Prinsip-prinsip Partisipasi Politik Masyarakat

Menurut Monique Sumampouw (2004:106-107), Adapun prinsip-prinsip partisipasi politik masyarakat yang tertuang dalam panduan pelaksana pendekatan partisipasi yang disusun oleh *departmen international development* (DFID) adalah:

- a. cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan *equal partnership*, pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan perkarsa serta mempunyai hak untuk

menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

- c. Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuhkan kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi yang kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan *sharing power/equal powership*.berbagai pihak terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan tanggung jawab *sharing responsibility*, berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan
- f. Pemberdayaan *empowerment*, keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan yang terjadi, suatu proses pembelajaran dan pemberdayaan satu sama lain.
- g. Kerja sama, diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelemahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan prinsip-prinsip menurut monique sumampouw (2004:106-107) yang dikemukakan departmen international development(DFID) bahwa, adapun hal yang harus dilaksanakan dalam prinsip-prinsip partisipasi politik guna untuk membantu kehidupan dalam bermasyarakat. Tentunya dalam prinsip ini pemerintah harus transparansi baik itu dalam berkomunikasi terbuka dngan masyarakat sehingga tak ada lagi kejanggalan antara pemerintah dan masyarakat

2.3 Model Dan Bentuk-bentuk Partisipasi politik

Model partisipasi politik, adalah tata cara dalam melakukan partisipasi politik. dimana, dalam model partisipasi politik ini kedalam dua bagian besar, yaitu: “*conventional*” dan “*unconventional*”. Untuk model *conventional*, adalah model klasik dari partisipasi politik seperti keikutsertaan dalam kegiatan pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini udah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Sedangkan model baru “(*new social movements*)”. Dalam gerakan sosial baru ini, muncul gerakan pro-lingkungan (*inviron mentalits*). Gerakan perempuan (gelombang feminist), protes mahasiswa, dan terror. Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengaju pada wujud nyata kegiatan politik tersebut.

Selanjutnya partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yang apabila dilihat sebagai suatu kegiatan, partisipasi politik dapat di bedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara untuk mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran untuk mengoreksi pemerintah, pembayaran pajak dan ikut dalam proses pemilihan pemimpin pemerintah. Sedangkan partisipasi politik pasif, adalah kegiatan sikap mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah (sastroamodjo, 1995:56).

Sementara itu di lihat kadar dan jenis aktivitas, milbarth dan goel

membedakan partisipasi politik beberapa tipe yaitu:

1. Tipe apatis (masa bodoh), yaitu orang yang menarik diri dari aktivitas politik.
2. Tipe *spectator*, yaitu orang-orang yang paling tidak pernah ikut dalam pemilihan umum.
3. Tipe gladiator, yaitu orang-orang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivitas masyarakat.
4. Tipe pengeritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Klasifikasi partisipasi politik hampir sama dikemukakan oleh Goel dan Osan, yang melihat partisipasi politik dari segi stratifikasi sosial, dari sudut pandang ini partisipasi politik dikategorikan dalam beberapa hal, seperti partisipasi politik yaitu pemimpin politik. partisipasi politik adalah komunikator, yaitu orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik pada orang lain. Berikutnya adalah aktivis politik, warga negara marginal, yaitu orang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik. terakhir orang-orang yang terisolasi, yaitu orang-orang yang jarang melakukan kontak dengan sistem politik.

Merangkum berbagai bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson (1994:16-17), kemudian mengklasifikasi partisipasi politik dalam 4 (empat) bentuk, yaitu: pertama, kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan

pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Kedua, lobbying yang mencakup upaya-upaya baik perorangan maupun kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah ataupun pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan di ambil. Ketiga, kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, mencari koneksi (contacting), yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau berapa orang. Oleh Verba Nie dan Kim partisipasi ini disebut mencari koneksi khusus (particularized contacting). Bentuk-bentuk partisipasi politik yang lebih lengkap di kemukakan oleh Rush and Altoff. Keduanya memvisualisasikan bentuk-bentuk partisipasi politik secara hierarkis.

2.4 Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan suatu aktifitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramla surbakti (1992:140) menyebutkan dua *variable* penting mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). yang dimaksud dalam kesadaran politik kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi,

kewajiban sosial dan lain-lain. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang di maksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramla subakri, 2006:144-145).

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, Mohtar Mas'ood dan Collin Mac Andrews (2011:56-57).

1. Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas

2. Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerjaan baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntunan-tuntunan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntunan-tuntunan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik

Sementara itu menurut Mibrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang,yaitu:

Pertama,berkenaan dengan pemerintah perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsangan politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup

besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup, seseorang yang hidup dalam negara yang demokrasi, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional, perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perilaku politik dan partisipasi politik

Partisipasi politik pemula dalam pilgub langsung memang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

Jadi menurut penulis bahwa partisipasi politik menumbuhkan motivasi setiap individu untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk motivasi setiap individu untuk

menduduki sebuah jabatan dalam bidang politik. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dari dalam diri individu-individu tersebut maka partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini berkaitan langsung dengan komunikasi politik, yang di maksud dengan komunikasi politik adalah kampanye-kampanye dan pemungutan suara, kampanye dalam pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi orang banyak (rakyat) secara persuasif, sedangkan paling mudah dipengaruhi oleh kampanye politik adalah mereka yang kurang minatnya terhadap politik.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat penulis mengambil suatu pandangan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari keterlibatan secara fisik dalam kegiatan-kegiatan politik, namun secara tidak langsung melalui sumbangan-sumbangan yang mereka berikan untuk kepentingan politik tertentu, hal ini dapat mewujudkan partisipasi politik masyarakat.

Menurut Almond di dalam buku *Perbandingan sistem politik*, Mohtar Masoed dan Collin Andrews (2008:56-57), bahwa: “Paling tidak terdapat 5 (lima) hal yang menyebabkan timbulnya kearah partisipasi lebih luas dan proses politik yaitu” :

1. Modernisasi.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.
4. Konflik antara kelompok-kelompok politik dan
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam sosial, ekonomi dan kebudayaan

Lebih lanjut Almond menjelaskan bahwa bentuk partisipasi politik konvensional merupakan bentuk partisipasi normal.

Menurut Ragambaran Rafael (2007:135), bahwa: “Didalam partisipasi politik

juga menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik dan sosialisasi politik yaitu” :

1. Sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik, melalui sosialisasi politik maka individu-individu/ masyarakat di harapkan mampu dan mau berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik.
2. Bentuk-bentuk partisipasi politik adalah pemungutan suara untuk pemilihan para calon wakil rakyat, presiden, kepala daerah dan Kepala Daerah.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat Bolaang Mongondow Selatan dalam politik adalah keterlibatannya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih bupati dan waki bupati kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2013-2018.

Keterlibatan dalam partisipasi politik tersebut dalam bentuk kampanye baik dalam partai maupun dalam kelompok tertentu, terlibat dalam tim sukses, melakukan sosialisasi serta memberikan hak suara pada pemungutan suara.

Dalam pelaksanaan pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden/ Wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah (bupati/ wakil bupati dan gubernur/ wakil gubernur), tingginya partisipasi masyarakat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pemungutan suara. Semakin banyak jumlah suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam politik

Padahal sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan langsung dinilai dari pendidikan politik masyarakat dengan lebih mengutamakan perlunya kebebasan berdemokrasi tanpa ada embel-embel lain seperti pembagian jabatan tertentu, pembagian proyek-proyek pemerintah dan lain-lain

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini di lakukan pada Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Waktu dilakukan penelitian ini pada tanggal 8 sampai 15 juni 2020.

3.2 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat di amati, jadi jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif.

3.3 Sumber data

1. Data primer

Data yang langsung di peroleh dari responden di mana anggota msdysrskst desa menjadi sampel dan kemudian data di analisis meliputi data tentang responden, data tentang ke ikutsertaan masyarakat Desa dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan wakil Bupati) dan data faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada. Dan data tentang pendidikan, umur, pekerjaan, dan data lain yang di anggap perlu.

2. Data skunder

Data informasi dan keterangan lainnya yang di pergunakan untuk

menjelaskan permasalahan yang akan di teliti, data tersebut di peroleh dari kantor Kepala Daerah Soputa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data tersebut meliputi:

- a) Data tentang lokasi penelitian
- b) Data hasil Pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati)
- c) Data lain yang di anggap perlu dalam penelitian

3.4 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kecamatan Helumo kabupaten Bolaang mongondow Selatan, yang mana informan ini memiliki informasi tentang pilkada dalam penelitian. Menurut Snafiah Faisal '' dalam bukunya Prof. Dr. Sugiyono'' penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal.

Jumlah informan dalam penelitian :

- 1. Ketua KPU kabupaten bolaang moongondow selatan,
- 2. BAWASLU kabupaten bolaang mongondow selatan,
- 3. Camat Helumo,
- 4. Panitia pengawasan kecamatan (panwascam),
- 5. Masyarakat kecamatan Helumo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara menurut Nurul Zuriah (2009:179) wawancara ialah Alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi dan sumber informasi. Misalnya mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat desa yang ada di kecamatan helumo dengan demikian penulis mengadakan tanya jawab kepada responden dan responden akan memberi jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
3. Dokumentasi, merupakan teknik yang dilakukan melalui pencarian barang-barang tertulis atau data yang ada bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau relevansi dengan pokok pembahasan dan dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan dokumen yang dibutuhkan oleh penulis antara lain data-data hasil pilkada yang dilaksanakan pada 9 desember 2020.
4. Angket (koesioner), yaitu berupa bentuk pertanyaan tertulis beserta alternative jawabanya, responden memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul di analisa dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan kemudiandiambil kesimpulan dan sara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

4.1 lokasi penelitian

4.1.1 Gambaran umum kecamatan Helumo

Kecamatan Helumo merupakan pemekaran dari wilayah kecamatan bolaang uki, peraturan daerah (Perda) kabupaten bolaang mongondow selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan kecamatan Helumo. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari beberapa desa yaitu; desa Biniha Timur, desa Biniha, desa Biniha Selatan, desa Duminanga, desa Halabolu, desa Trans Patoa, desa Bakida, desa Sinandaka, desa Soputa, desa Pangia dan desa Motolohu. Dengan luas wilayah kecamatan helumo adalah 138,22km² berbatasan dengan wilayah, sebelah utara berbatasan kawasan taman nasional Bogani Nani Wartabone kabupaten bolaang mongondow utara, sebelah selatan berbatasan dengan laut Tomini, sebelah timur berbatasan dengan desa tangagah kecamatan bolaang uki dan sebelah barat berbatasan dengan desa Botuliodu kecamatan Posigadan. Ibu kota kecamatan Helumo berkedudukan di wilayah desa Duminanga. Dengan jumlah penduduk 6.360 jiwa dan jumlah kepala keluarga 690 (KK).

4.2 Hasil Penelitian

Dari pantauan dan pengamatan di beberapa daerah pemilihan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas laporan warga terdapatnya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) misalnya adanya isu Money

politik, intimidasi terhadap warga eks-transmigrasi dan masih banyak laporan pelanggaran lainnya (panwas pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2020). Jika diprediksi dari 330 daerah kab/kota yang sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan penulis meyakini tergolong sukses tanpa ada kerusuhan dan konflik yang berlarut-larut seperti daerah lainnya di Indonesia. Peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 2 pasangan calon yaitu (1) Hi.Iskandar Kamaru,SPT berpasangan Deddy Abdul Hamid dan (2) Riston Mokoagow berpasangan Silfi Mokoagow.Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati di atas terdiri dari berbagai profesi, ada dari birokrat, politisi dan pengusaha. Partisipasi politik di Kecamatan Helumo dalam pemberian suara terhadap masing-masing calon bupati dan wakil bupati terdistribusi secara bervariasi.

Adapun visi dan misi dari tiap-tiap pasangan calon sebagai berikut:

(1) Hi.Iskandar Kamaru,SPT berpasangan Deddy Abdul Hamid

VISI:

Terwujudnya kabupaten Bolssel yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan gotong royong dan berdasarkan Pancasila.

MISI:

1. Meningkatkan nilai-nilai religius dan bersatu memelihara toleransi umat beragama yang berkeadilan lokal berdasarkan Pancasila
2. Meningkatkan pembangunan kewilayahan yang berdaulat
3. Meningkatkan kapasitas ekonomi untuk kesejahteraan rakyat yang mandiri dan

berwawasan lingkungan

4. Meningkatkan pelayanan public berbasis teknologi informasi dan inovasi melalui tata kelola pemerintahan yaang baik dan bersih
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya serta berdaya saing
6. Meningkatkan akses interkoneksi perwilayahan guna mempercepat pemulihan ekonomi.

(2) Riston Mokoagow berpasangan Silfi Mokoagow.

VISI:

Inovsatif, maju dan berdaya saing

MISI

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat yang berbasis pertanian dan perikanan
2. Mewujudkan kawasan ekonomi strategi daerah yang berwawasan ekonomi strategi daerah yang berwawasan lingkungan yang didukung infrastuktur yang handal
3. Membangun pertanian dan perikanan terpadu yang inovatif, kreatif dan gandal
4. Pembentukan badan usaha daerah (BUD) dan badan usaha desa (BUMDES)
5. Perwujudan ruang wilayah yang tanggap terhadap bencana
6. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal serta penguasaan teknologi
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi seluruh

rakyat

8. Menggali dan menumbuhkan nilai-nilai budaya asli daerah untuk menjadi filosofi bermasyarakat
9. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercatat jumlah tiap desa yang mempunyai hak pilih sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Jumlah penduduk Kecamatan Helumo yang mempunyai hak pilih

NO	NAMA DESA	PENDUDUK YANG MEMPUNYAI HAK PILIH	PENDUDUK YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	PROSENTASE YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	Biniha Selatan	215	7	0,7 %
2	Biniha Induk	480	0	0,0 %
3	Biniha Timur	248	3	0,3 %
4	Duminanga	615	2	0,2 %
5	Halabolu	288	1	0,1 %
6	Trans Patoa	233	0	0,0 %
7	Bakida	770	6	0,6 %
8	Sinandaka	414	4	0,4 %
9	Soputa	260	0	0,0 %
10	Pangia	510	6	0,6 %
11	Motolohu	414	1	0,1 %
JUMLAH		4251	30	0,30 %

Sumber: Panitia pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah penduduk Kecamatan Helumo berdasarkan desa yang memiliki hak pilih yaitu Desa Biniha Selatan, 215 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 7 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,7%. Desa Biniha Induk 480 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih, 0 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,0% Desa Biniha Timur 248 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 3 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,3%. Desa Duminanga 615 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 2 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,2%. Desa Trans Patoa 233 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 0 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,0%. Desa Bakida 770 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 6 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,6%. Desa Sinandaka 414 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 4 orang prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,4%. Desa Soputa 260 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 0 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,0%. Desa Pangia 510 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 6 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,6%. Desa Motolohu 414 orang yang memiliki hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 1 orang, prosentase yang tidak menggunakan hak pilih 0,1%. Untuk melihat jumlah

surat suara yang diberikan oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 : Surat suara yang diberikan oleh masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kecamatan Helumo tahun 2020

No	Nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	Surat suara yang sah	Surat suara yang rusak/ tidak sah	Surat suara yang tidak masuk	Persentase surat suara yang sah
1	Hi.Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid	3055	20	1	72.8%
2	Riston Mokoagow dan Selfie Mokoagow	1143	33	2	27.2%
Jumlah surat suara		4198	53	3	100%
Jumlah daftar pemilih tetap		4251			

Sumber: Panitia pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kecamatan Helumo tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat Hi.Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid mendapat suara 3055 atau (72.8%), Riston Mokoagow dan Selfie Mokoagow mendapat 1143 suara atau (27.2%), Surat suara yang tidak sah (53) atau (0,53%) dan surat suara yang tidak masuk (3) atau (0,3%).

4.1.1 Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah

Bukan perkara yang instan untuk meneliti masyarakat di Kecamatan Helumo, dimana sebelum melakukan penelitian penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan penulis lontarkan kepada responden yang ada di Kecamatan Helumo maupun pada masyarakat karena penulis harus menyiapkan betul-betul beberapa pertanyaan

yang bisa merepresentasikan keaktifan dan partisipasi mereka dalam politik, dalam angket yang penulis buat penulis memberikan sepuluh pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis buat dapat mungkin agar bisa menentukan apakah masyarakat Kecamatan Helumo tergolong masyarakat yang aktif atau pasif dalam kegiatan perpolitikan. Penulis juga menyertakan biodata dari masyarakat Kecamatan Helumo dari nama, umur, pekerjaan dan jenis kelamin. Hal itu bertujuan agar menjadi pembeda dan kategori antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan penulis melakukan metode wawancara dan angket, Menurut Esterberg wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, sementara menurut Setyadin wawancara adalah suatu percakan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik selain wawancara penulis juga melakukan angket, angket ialah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui” Sedangkan menurut Sugiyono angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada informan untuk dijawab”.

Penulis telah melakukan wawancara dengan ketua KPU Bolaang Mongondow Selatan bapak Stenly E. Kakunsi mengatakan bahwa “partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap pilkada pada tahun 2020 sangat berbeda dikarenakan 86% masyarakat berpartisipasi dalam pilkada tahun 2020 walaupun masih ada 14% masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya setelah bapak Stenly E. Kakunsi menelusuri bahwa 14% itu dikarenakan ada surat suara yang rusak dan ada juga yang tidak datang ke lokasi pelaksanaan pemilihan (TPS).

Hasil wawancara penulis dengan camat helumo bapak Noldi Tangahu SH. beliau mengatakan bahwa ``tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kecamatan helumo yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember kemarin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya walaupun ditengah pandemi Covid-19 masyarakat memberika hak suaranya dikarenakan kesadaran masyarakat dalam pilkada dan pelaksanaan pemilhan telah berjalan dengan sukses walaupun ada kendala yang tak terduga namun semua bisa diatasi oleh panitia pengawasan kecamatan``. (hasil wawancara tanggal, 9 juni 2021).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pimpinan bawaslu devisi pengawasan Kifly Y. Molanda, ST, beliau telah mengatakan bahwa ``telah mengajak para tokoh masyarakat, agama dan pemuda untuk bisa mengawasi pelaksanaan pilkada dilaksanakan pada tanggal 9 desember agar bisa berjalan dengan lancar dan bapak Kifly Y. Malando, ST, mengatakan ketika ada kegagalan dalam pilkada agar kiranya masyarakat segera dilaporkan, bapak kifly Y. Malonda, ST, juga menegaskan kepada masyarakat menolak dengan adanya politik uang (*money politics*). Beliau juga mengatakan bahwa setelah terlaksananya pilkada beliau juga mengati bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2020 meningkat``. (hasil wawancara tanggal, 9 juni 2021).

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Bapak Risman Ibrahim salah seorang tokoh Masyarakat dan Aktif di kegiatan social yang ada di Kecamatan Helumo, Menanggapi Hasil Kemenangan Pasangan Hi.Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid di pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Khususnya di Kecamatan Helumo, “bahwasanya dengan terpilihnya Pasangan Hi.Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid kita mengharapkan Perubahan Pembangunan lebih baik khususya dibidang Pembangunan Jalan dan mengharapkan anggaran dan bantuan dari pemerintahan kabupaten itu sendiri di learisasikan secara sempurna dan tidak ada lagi potongan-potongan anggaran”. (hasil wawancara tanggal, 9 juni 2021).

Seterusnya melihat kondisi dan peran partisipasi maasyarakat di Kecamatan Helumo yang masih kurang efektif maka dari itu di pandang perlu Mewawancarai Masyarakat salah satu desa yang ada di Kecamatan Helumo, Ibu Marhan Ibrahim salah seorang Ketua KPPS TPS 1 dan masyarakat desa Soputa, sebagai dasar awal penelitian bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik di desa soputa di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

beliau mengatakan, “Dalam pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Tahun 2020 masyarakat banyak mengeluhkan masalah ekonomi di mana ada sebagian masyarakat yang bekerja di luar desa dan akhirnya tidak bisa mengikuti pencoblosan karena mengingat biaya yang mereka butuhkan untuk pulang kampung itu, dan ada juga masyarakat yang memang benar benar malas datang ke TPS atau lebih mementingkan bersantai di rumah, serta masyarakat yang tidak patuh dengan hukum atau peraturan”. (hasil wawancara tanggal, 10 juni 2021).

Penulis melakukan wawancara dengan panitia pengaasan kecamatan (Panwascam), Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bernama bapak Risman Ibrahim sangat membantu penulis untuk mengetahui beberapa data-data di kecamatan Helumo dan di tiap-tiap desa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini beliau juga menjelaskan beberapa alasan mengenai warga dikecamatan Helumo yang GOLPUT dalam pemilihan kepala Daerah. Selain menggunakan metode wawancara penelitian penulis juga menggunakan metode angket yang dibagikan kepada 100 orang atau responden dari latar belakang yang berbeda. Hal itu menjadi poin penting dalam penyusunan skripsi penulis, karena itu menjadi hal yang paling utama, yaitu partisipasi masyarakat dalam politik. Dari masyarakat yang beragam tersebut penulis menerima jawaban yang satu sama lain tidak jauh berbeda bahkan hampir semua responden mengemukakan jawaban yang sama terhadap pertanyaan yang penulis lontarkan.

Selain meminta keterangan dari masyarakat dalam bentuk angket dan wawancara ringan, saya juga mewawancarai sekretaris Desa Bakida yaitu bapak Ompi tanau, beliau meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya ditengah kesibukannya sebagai sekretaris desa,

“beliau mengatakan bahwa jumlah pemilih di Desa Bakida adalah sekitar 770

orang pemilih dari angka tersebut masih menurut beliau yang berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah adalah sekitar 82% dan sisanya tidak berpartisipasi (GOLPUT) beliau mengatakan jika ada beberapa hal yang melatarbelakangi masyarakat dalam keikutsertaannya pada pemilihan Kepala Daerah yang pertama yaitu pergesekan-pergesekan yang terjadi di kalangan masyarakat itu sendiri dalam artian masyarakat tak menjagokan satupun calon Kepala Daerah yang siap untuk dipilih``. (hasil wawancara tanggal, 10 juni 2021).

tapi beliau memberitahukan pada saya bahwa faktor terbesar yang melatarbelakangi partisipasi mereka pada pemilihan yaitu jarak tempuh, dimana ada dusun yang jarak tempuhnya relatif jauh ke desa Bapak Ompi Tanau mengatakan tidak ada perbedaan dalam partisipasi politik dilihat dari segi gendernya, karena saat ini menurutnya merupakan zaman emansipasi sehingga baik pria maupun wanita sama-sama menyumbangkan hak pilihnya sesuai pilihan mereka. Dilihat dari segi pekerjaan juga mereka tidak ada perbedaan, bapak Ompi Tanau mengatakan jika antara profesi yang bisa dikatakan tinggi maupun profesi yang bisa dikatakan rendah semuanya sama rata tidak ada hal yang menonjol, misal karena si A punya pekerjaan bagus dan mengerti politik si A lebih aktif dan si B yang punya pekerjaan rendah dan tak paham politik maka si B lebih pasif, hal tersebut tidaklah jadi faktor penentu partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa. Bahkan bapak Ompi Tanau mengatakan jika masyarakat saat ini diberdayakan untuk melek terhadap dunia politik, hal itu dimulai pada tahun 2015 dimana pemerintah meninjau sejauh mana partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam politik, sehingga pemberdayaan masyarakat punya fungsi untuk menciptakan masyarakat yang punya kesadaran politik yang tinggi. Bapak Ompi Tanau mengatakan jika visi misi calon Kepala Daerah sangat jadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan sehingga visi misi bukan hanya harapan kosong

belaka karena masyarakat berharap dengan visi misi yang dibawa calon Kepala Daerah akan membawa perubahan pada desa tersebut. Menurut bapak Ompi Tanau postur juga sangat menentukan pilihan masyarakat apakah si A cukup meyakinkan untuk memimpin Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga fisik jadi salah satu modal dari calon Kepala Daerah yang bisa meyakinkan pemilih, selain fisik bapak Ompi Tanau juga mengatakan bahwa keturunan menjadi hal yang penting dan jadi pertimbangan para pemilih, dan pertimbangan lainnya yaitu agama, walaupun secara keseluruhan masyarakat Kecamatan Helumo beragama islam tetapi perbedaan organisasi dalam islam juga jadi penentu pemilih untuk menentukan pilihannya. Selain itu faktor penting yang jadi penentu pilihan masyarakat yaitu pada masa kampanye sehingga saat kampanye sebisa mungkin meyakinkan dan bisa merebut hati masyarakat. Bapak Ompi Tanau mengatakan jika di Kecamatan Helumo partisipasi pemilihan Kepala Daerah meningkat dari tahun sebelumnya, bahkan ia juga menyampaikan apresiasinya untuk masyarakat pada penulis ia berkata walaupun masyarakat pendidikannya rendah dan ekonominya kekurangan tetapi mereka punya partisipasi politik yang sama dengan orang-orang yang memang melek politik. Profesi mereka tidak menjadi alasan untuk tidak berpartisipasi, mereka sangat antusias pada pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap masyarakat mengenai partisipasi mereka dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, penulis membagi kedalam beberapa indikator seperti jenis kelamin, pekerjaan, usia. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis apakah gender bisa mempengaruhi

pilihan mereka dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau malah sebaliknya dalam artian gender bukan lagi menjadi sebuah isu yang harus diperdebatkan selama mereka punya kompetensi hal itu.

Di kecamatan Helumo pekerjaan masyarakatnya sangat beragam dari petani, buruh, wiraswasta, PNS dan banyak lagi sehingga menciptakan yang punya pemahaman yang beragam mengenai politik, baik pemahaman politik dalam skala kecil (desa) maupun pemahaman politik dalam skala besar (negara) ada teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi pekerjaan seseorang atau makin tinggi jabatan seseorang maka partisipasi politiknya akan tinggi juga dan semakin rendah pekerjaan seseorang maka keikutsertaan dalam politiknya juga semakin rendah. Menyikapi hal ini saya berpendapat bahwa teori ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah karena berdasarkan pengamatan saya di lapangan faktanya tidak menunjukkan demikian, bahkan mereka yang bekerja sebagai buruh dan petani pada kenyataannya sangat aktif dalam pemilihan, saya bisa tarik kesimpulan dalam hal ini, dalam artian ini bisa disebabkan oleh banyak faktor misalnya, jika tidak ikut serta atau berpartisipasi dalam pemilihan maka ia akan merasa tidak enak hati dengan orang lain yang datang ke TPS untuk memilih pemimpinnya, tapi hal itu bisa saja salah karena mereka bisa saja datang ke TPS memang dari hati yang paling dalam, mereka ingin benar-benar memilih orang yang tepat yang bisa memimpin wilayahnya sehingga bisa merubah sedikit atau banyak tentang kebijakan-kebijakan sehingga lebih pro rakyat.

4.1.2 Keunggulan dan Kekurangan Partisipasi Politik Masyarakat pada

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap masyarakat kecamatan Helumo penulis memakai 2 metode yaitu angket, dan disela-sela angket yang penulis lakukan penulis melakukan wawancara ringan ke beberapa orang sehingga penulis memiliki keterangan-keterangan dan pandangan yang lebih mendetail mengenai partisipasi mereka dalam pemilihan Kepala Daerah dalam sesi angket ini bukan perkara yang mudah karena ada beberapa lansia yang tidak bisa membaca dan tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga penulis membantu mereka untuk membacakan dan menuliskan apa yang ingin mereka ungkapkan. Dalam angket yang penulis lakukan penulis memberikan sepuluh pertanyaan pada mereka mengenai partisipasi mereka dalam politik.

Dalam metode angket yang digunakan penulis menggunakan metode Guttman, Penelitian Skala Guttman tradisional adalah penelitian bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan ditanyakan, dan selalu dibuat dalam pilihan ganda yaitu “yadan tidak”, “benar dan salah”, “positif dan negative”, untuk penilaian jawaban misalnya untuk jawaban positif diberi skor 1 sedangkan jawaban negative diberi skor 0 dengan demikian bila jawaban dari pertanyaan adalah setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0 bila skor dikoversikan dalam persentase maka secara logika dapat dijabarkan untuk jawaban setuju skor $1 = 1 \times 100\% = 100\%$, dan tidak setuju diberi skor $0 = 0 \times 0\% = 0\%$.

1) Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Hampir semuanya menjawab bahwa mereka ikut serta dalam pemilihan Kepala

Daerah, dari 100 responden 93 orang menjawab ikut serta dalam pemilihan kepala Daerah, ada beberapa yang menjawab tidak ikut karena beberapa alasan yang memang bisa ditolelir dalam artian mereka memang punya urusan yang penting ,baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal lain yang memang tidak bisa ditunda, tetapi mereka sebenarnya ingin dan niat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala Daerah Kepala Daerah sebelumnya, ada juga dari mereka yang berkata alasan mereka ikut serta dalam pemilihan ini karena benci dan tidak ingin dipimpin oleh salah satu calon Kepala Daerah sehingga ia sebisa mungkin memberikan suaranya kepada calon Kepala Daerah lainnya, ada 7% yang memberikan alasan jika mereka benci dinasti politik karena sebelumnya telah memimpin Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan tidak ada perubahan yang berarti.

1.1 Tabel Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah anda berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah?	93	7	100

2) Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Pemilihan

Rata-rata mereka menjawab bahwa mereka melakukan pemilihan karena inisiatif sendiri dari 100 responden 91 orang menjawab karena inisiatif sendiri, dan kebanyakan berkata tak ada yang mempengaruhi mereka untuk memilih kepala daerah , hal itu menunjukkan jikalau mereka mempunyai kesadaran politik yang sudah tinggi, hal itu bisa saya amati di berbagai pemilihan, tak hanya pemilihan Kepala Daerah tapi di

pemilihan lainnya baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden masyarakat Kecamatan Helumo selalu berbondong- bondong memenuhi TPS, salah satu generasi muda dari Desa Bakida berkata bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu karena mereka ingin sosok baru yang bisa membawa perubahan terhadap daerah mereka, bahkan mereka menambahkan jikalau mereka ingin pemimpin yang bisa memaksimalkan dana 1 milyar lebih per desa yang dikucurkan oleh pemerintah. Ada 9% memberikan alasan bahwa mereka terpengaruh oleh seseorang yang memberikan isu-isu yang tidak benar kepada calon kepala daerah sehingga mereka ragu dalam berpartisipasi dalam pilkada sehingga dalam perhitungan suara ada surat suara yang tidak tercoblos dikarekan tidak datang ke TPS.

1.2 Tabel Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Pemilihan

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah anda berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa karena inisiatif sendiri ?	91	9	100

3) Tingkat Kepedulian Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah

Rata-rata mereka menjawab peduli pada pemilihan Kepala Daerah, dari 100 angket yang saya buat seluruhnya (100%) mereka peduli pada pemilihan Kepala Daerah, hal itu merupakan hal yang bagus dan menunjukkan jikalau mereka bukanlah penduduk yang apatis terhadap kehidupan politik, namun sebaliknya mereka adalah orang yang aktif dalam kegiatan politik, hal itu salah satu tanda yang cukup baik jika

mereka peduli pada pemilihan Kepala Daerah.

1.3 Tabel Tingkat Kepedulian Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah anda peduli pada pemilihan Kepala Daerah?	100	0	100

4) Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Sebelumnya

Rata-rata mereka menjawab jika mereka selalu berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, dari 100 responden 83 orang menjawab selalu ikut serta kecuali bagi pemilih pemula yang memang baru pertama kali ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah. Jadi bisa disimpulkan bahwa mereka merupakan orang yang memang sudah tertanam kesadaran-kesadaran akan kehidupan berdemokrasi sehingga mereka sadar bahwa pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan setiap tahun dalam artian pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan hanya 5 tahun sekali sehingga mereka punya pemikiran untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memilih Kepala Daerah yang sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Ada 17% masyarakat yang tidak ikut dalam partisipasi dikarenakan tidak punya kepedulian dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

1.4 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Sebelumnya

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
------------	----	-------	--------

Apakah anda selalu berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah sebelumnya ?	83	17	100
---	----	----	-----

5) Pengaruh Visi Misi Calon Kepala Daerah

Dari 100 responden 92 responden mementingkan visi misi, jadi rata-rata responden mementingkan visi misi sebelum memilih Kepala Daerah terutama kaum pemilih muda yang memang dikenal sangat idealis dengan jiwa mudanya, tapi ada beberapa responden yang tidak mementingkan visi misi sebelum memilih Kepala Daerah, responden tersebut rata-rata sudah berumur (tua) sehingga mungkin bagi mereka visi misi tidak menjadi indikator mereka dalam memilih Kepala Daerah, biasanya orang yang seperti itu (walaupun tidak semuanya) melihat figure atau sosok mengenai siapa yang dia pilih sehingga jika dia mengenal dia akan secara otomatis memilih orang tersebut berbeda dengan para pemilih muda yang sudah berfikiran maju dan terbiasa menerima informasi politik, ada 8% masyarakat yang mempertimbangkan visi misi dari para calon kepalah daerah sehingga masyarakat mengutamakan visi misi sebagai poin penting yang akan menentukan nasib desa mereka kedepannya sehingga mereka akan memilih orang yang memang punya visi misibagus bagi daerahnya.

1.5 Tabel Pengaruh Visi Misi Calon Kepala Daerah

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
------------	----	-------	--------

Apakah anda mempertimbangkan visi misi sebelum memilih Kepala Daerah ?	92	8	100
--	----	---	-----

6) Politik Uang Sebelum Pemilihan

Rata-rata responden menjawab bahwa mereka tidak akan menerima uang yang dibagikan oleh calon Kepala Daerah dari 100 responden sekitar 64 responden menjawab tidak menerima, walaupun kenyataan dilapangan ada yang berkata bahwa , sebelum pemilihan ada acara bagi-bagi uang bahkan bagi-bagi uang tersebut dilakukan oleh kedua calon Kepala Daerah sehingga disini terjadi aktifitas money politic yang tidak hanya dilakukan oleh satu calon Kepala Daerah saja tetapi kedua-duanya, berdasarkan keterangan yang saya dapatkan orang yang membagi-bagi uang tersebut disebar disetiap kampungnya dan yang akan menerima uang tersebut di data masih berdasarkan pengakuan masyarakat desa yang saya wawancara bahwa mereka mendapatkan Rp. 1 50.000,00 per satu orang jika ada 4 orang dalam satu kepala keluarga mereka mendapatkan Rp. 600.000,00. Dan pada saat saya memberikan angket kepada mereka mengenai hal ini hampir semuanya berkata jika mereka tidak menerima uang tersebut bahkan orang yang berkata kalau dia menerima uang dari calon Kepala Daerah dan memberikan informasi secara detail mengenai mekanisme pembagian uang tersebut diangket yang saya bagikan ia tidak ingin jawaban yang sebenarnya, 36% ada yang bilang pamali, ada yang bilang takut dan sebagainya. Sehingga di pertanyaan ini tidak semuanya menjawab berdasarkan hati yang paling dalam.

1.6 Tabel Politik Uang Sebelum Pemilihan

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah anda akan menolak uang yang dibagikan oleh calon kepala Daerah ?	64	36	100

7) Politik Uang Menurut Masyarakat

Mereka hampir semua menjawab kalau begi-bagi uang merupakan suatu pelanggaran, dari 100 responden 95 responden menjawab suatu pelanggaran, tapi ada beberapa orang tua yang menjawab bahwa mereka menganggap bagi-bagi uang sebelum pemilihan merupakan kebaikan dari calon Kepala Daerah, bahkan dia menganggap bahwa bagi-bagi uang merupakan hal yang wajar dan tidak menganggap hal itu sebagai sebuah pelanggaran berat, mereka bahkan ada yang terang-terangan mengharapkan ada calon yang membagi-bagikan uang sebelum pemilihan Kepala Daerah, maka dengan otomatis ia akan memilih Kepala Daerah tersebut. Kaum muda di Kecamatan Helumo secara tegas mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran dalam pilkada tapi mereka anggap itu bukan merupakan sesuatu yang aneh dan mereka menganggap bahwa itu banyak dilakukan oleh politisi di Indonesia untuk mendukung suara yang banyak dalam pemilihan. Ada 5% dari mereka yang tidak mempermasalahkan hal tersebut mereka menganggap selama Kepala Daerah tersebut akan mengembangkan tugas dengan benar-benar hal itu boleh dilakukan selama uang yang dibagikan uang mereka pribadi dan bukan hasil dari perbuatan- perbuatan yang dilarang (korupsi).

1.7 Tabel Politik Uang Menurut Masyarakat

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah bagi-bagi uang sebelum pemilihan adalah suatu pelanggaran ?	95	5	100

8) Pengaruh Lingkungan Terhadap Pilihan Masyarakat

Dari 100 responden 87 responden menjawab bahwa lingkungan tidak mempengaruhi pilihan mereka terhadap Kepala Daerah, dalam artian mereka mempunyai prinsip yang kuat dalam memilih calon Kepala Daerah tidak berdasarkan ikut-ikutan semata, itu sangat penting dalam sebuah lingkungan masyarakat yang demokratis dan hal itu adalah salah satu modal demi terciptanya masyarakat madani, jika masyarakat hanya ikut-ikutan saja hal inilah yang sangat berbahaya dan menandakan sebagai masyarakat yang tidak mempunyai prinsip, oleh karena itu beberapa dari mereka berkata berprinsip sangatlah penting karena jika hanya didasarkan atas ikut-ikutan semata berarti kita bukan tipe orang yang pandai dalam menilai visi dan misi yang dibawa oleh calon Kepala Daerah, Oleh karena itu visi misi menjadi hal yang sangat perlu diketahui oleh pemilih agar saat pemilihan tidak didasarkan atas ikut-ikutan semata. Ada 13% terpengaruh dikarenakan oleh lingkungan baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dalam pemilihan.

1.8 Tabel Pengaruh Lingkungan Terhadap Pilihan Masyarakat

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah anda tidak terpengaruh lingkungan terhadap pilihan yang anda pilih ?	87	13	100

9) Pandangan Masyarakat Mengenai Seberapa Penting Pemilihan Kepala Daerah

Dari 100 responden 88 responden menjawab sangat penting untuknya, sehingga mereka sangat antusias terhadap pemilihan Kepala Daerah, mereka ingin pemimpin yang mampu bekerja secara nyata untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki terutama hal-hal yang sangat krusial dan penting di desa tersebut misalnya perbaikan jalan yang memang jadi kendala di Desa dan ada 12% responden yang menganggap bahwa pemilihan Kepala Daerah tidaklah penting, tetapi mereka tetap memilih Kepala Daerah walaupun mereka menganggap bahwa itu tidak akan memberikan efek apapun pada desanya. Karena beberapa dari mereka menganggap siapapun Kepala Daerahnya tidak jauh dari tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan apalagi sekarang desa menerima satu milyar lebih per tahun bagi mereka-mereka kaum muda yang idealis hal itu adalah lahan empuk bagi siapapun yang akan memangku jabatan sebagai Kepala Daerah.

1.9 Tabel Pandangan Masyarakat Mengenai Seberapa Penting Pemilihan Kepala Daerah

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah pemilihan Kepala Daerah itu penting untuk anda ?	88	12	100

10) Pengaruh Masyarakat Untuk Mempengaruhi Pilihan Orang Lain

Rata rata mereka menjawab bahwa mereka tidak pernah mempengaruhi orang lain untuk memilih Kepala Daerah yang mereka pilih dari 100 responden 77 responden menjawab tidak mempengaruhi orang lain, mereka beranggapan bahwa itu adalah hak pribadi dari masing-masing individu sehingga mereka tak berhak untuk mengintervensi

pilihan orang lain. 23% dari mereka berkata bahwa mereka tidak ada untungnya untuk mengajak orang lain mengikuti pilihan mereka karena bisa saja yang mereka anggap bagus tapi ternyata di eksekusinya (setelah memangku jabatan) sebagai Kepala Daerah mereka tak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya (sesuai yang mereka harapkan) beberapa dari mereka berkata bahwa pilihanku adalah pilihanku dan pilihanmu adalah pilihanmu sehingga tak ada hak untuk intervensi satu sama lain. Sementara menurut pendapat orang yang mengajak hal itu demi kebaikan desa sehingga mereka berusaha memenangkan orang yang bersangkutan dengan mempengaruhi orang lain.

1.10 Tabel Pengaruh Masyarakat Untuk Mempengaruhi Pilihan Orang Lain

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah anda turut serta mempengaruhi orang lain untuk memilih Kepala Daerah yang anda pilih ?	77	23	100

Keterangan : P1 adalah pertanyaan pertama, P2 : Pertanyaan kedua, P3 : Pertanyaan ketiga, P4: Pertanyaan keempat, P5 : pertanyaan kelima, P6: pertanyaan ke 6, P7: pertanyaan ketujuh, P8 : pertanyaan kedelapan, P9: pertanyaan ke 9, P10 : pertanyaan ke 10 sedangkan No. adalah Jumlah dan nama responden yang diganti dengan angka (*“untuk menghemat kolom”*)

Presentase Partisipasi Politik Masyarakat

ITEM PERTANYAAN	(%) JAWABAN YA	(%) JAWABAN TIDAK
P1	93	7
P2	91	9
P3	100	0
P4	83	17
P5	92	8
P6	64	36

P7	95	5
P8	87	13
P9	88	12
P10	77	23
TOTAL	870	130
RATA-RATA	87	13

Untuk mengetahui posisi persentase jawaban “ya” yang diperoleh dari angket maka dihitung terlebih dahulu kemudian ditempatkan dalam rentang skala persentase sebagai berikut :

Nilai Jawaban “Ya” 1

Nilai Jawaban “Tidak” 0

Dikonversikan dalam persentase :

Jawaban “Ya” : $1 \times 100\%$: 100%

Jawaban “Tidak” : $0 \times 100\%$: 0% (sehingga tidak perlu dihitung)

Perhitungan Jawaban “Ya” dari angket :

Jawaban “Ya” rata-rata : $87/100 \times 100\% = 87\%$

Sehingga bila digambarkan dalam skala :

0%50%87%100%

Dari analisis Skala Guttman, titik kesesuaian diatas 50% yaitu 87%, sehingga dapat dikatakan partisipasi politik masyarakat mendekati tinggi.

Sebagai Kesimpulan :

Partisipasi politik masyarakat mendekati tinggi, dengan persentase sebesar 87%.

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bersasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari responden mengenai pendapat mereka tentang partisipasi masyarakat kecamatan helumo kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meliputi faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan kepribadian individu dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kecamatan Helumo, dapat dilihat berdasarkan data yang penulis peroleh pada hasil penelitian, tentang banyaknya informan yang menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat kecamatan helumo kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di kategorikan belum maksimal. Faktor tingginya partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten bolaang mongondow selatan di kecamatan Helumo disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan kepribadian individu dalam masyarakat.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada petugas panitia pemungutan suara kecamatan helumo kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan masyarakat Kecamatan Helumo dalam pemilihan kepala daerah diharapkan kedepan akan lebih baik dalam mengsucceskan pemilu pada kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berazaskan langsung, umum, bebas dan rahasia

tanpa adanya masalah yang dapat merusak proses demokrasi dari rakyat untuk rakyat dalam pemilu pada kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kepada pihak pemerintahan kecamatan Helumo kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diharapkan mengatur serta ikut mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan hak suara untuk pemilu pada kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berikutnya. Kepada masyarakat kecamatan Helumo untuk dapat lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dengan demikian masyarakat tersebut ikut berpartisipasi politik pada pemilu pada kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2020-2025. Kepada masyarakat kecamatan Helumo kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar dapat berperan aktif dalam berpartisipasi politik dalam pemilu pada kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2020-2025 yang akan datang serta jangan beranggapan tidak ada untungnya dalam berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, karena dengan berpartisipasi dalam pemilu tersebut masyarakat dapat memilih calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang pantas untuk memimpin kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lima tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- CSIS. 2007. *Mebangun Indonesi dari Daerah: Partisipasi Publik dan politik Anggaran Daaerah*, Yogyakarta: Kanisius Media
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta Kencana Media Group
- Nurul Zuriah, M.Si. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta:PT Bumi Aksara
- Henry Subiakto, Rachmah Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Media Group
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press (konpress)
- Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: PustakaBelajar
- Muhadam Labolo. 2010. *Meemahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Michael Rush dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi dan Politik*, Jakarta:PT Rineka Cipta
- Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Jakarta: Gramedia PustakaUtama
- _____2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia
- Miftah Thoha. 2005. *Perilaku Organisasi Dan Konsep Dasar*, Jakarta: PT rajaGrafindo Persada
- Mohtar Mas' oed, Colin Mac Andrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moh Mahfud MD, SH, S.U. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Mohtar Mas' oed, Colin Mac Andrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University

- Rafael Raga Maram. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Widjanarto Puspoyo. 2012. *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono*, Solo: Era Adicipta Intermedia
- Soejono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta

Sumbe Lain:

- <http://jurnal.umrah.ac.id/?tag=partisipasi-politik> (*Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*) oleh Adi Pranadipa di posting pada 26 Agustus 2013. Di unduh pada 12 februari 2014 jam 21:33
- Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X *Peranan Opinion Leader Dalam Meningkatkan Peran Politik Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan* oleh Nina Yudha Aryanti: di posting pada tanggal oleh JOD Fisip UNBARA di unduh pada 1 oktober 2014 jam 20:00
- <http://www.inhilkab.go.id/index.php/Profil/kondisi-umum.html>, di kelola Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) kabupaten indragiri hilir. Di unduh 20 oktober 2014

Peraturan Perundang-undangan:

- PP RI No.6 Tahun 2005 *tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

LAMPIRAN

Dari instrument pengumpul data secara angket diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
7	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
8	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
11	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
17	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
18	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
19	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
24	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
25	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
28	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
30	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
32	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

34	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
35	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
36	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
37	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
39	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
43	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
44	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
45	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
48	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
50	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
51	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
55	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
56	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
59	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
62	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
65	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
66	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
67	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
75	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
79	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
80	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
81	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
82	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
87	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
93	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
95	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
99	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah?
2. Apakah anda berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa karena inisiatif sendiri?
3. Apakah anda peduli pada pemilihan Kepala Daerah?
4. Apakah anda selalu berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah sebelumnya?
5. Apakah anda mempertimbangkan visi misi sebelum memilih Kepala Daerah ?
6. Apakah anda akan menolak uang yang dibagikan oleh calon kepala Daerah ?
7. Apakah bagi-bagi uang sebelum pemilihan adalah suatu pelanggaran?
8. Apakah anda tidak terpengaruh lingkungan terhadap pilihan yang anda pilih?
9. Apakah pemilihan Kepala Daerah itu penting untuk anda?
10. Apakah anda turut serta mempengaruhi orang lain untuk memilih Kepala Daerah yang anda pilih ?

Dokumentasi Wawancara



ABSTRACT

SUPRANDI AIYADI. S2117046. THE COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN THE ELECTION OF REGIONAL HEAD AND DEPUTY HEAD IN THE HELUMO SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

This study aims as, 1) to find out the community political participation in the 2020-2025 elections in the Helumo Subdistrict of the South Bolaang Mongondow District, 2) to analyze the political participation of the community in the 2020-2025 elections in the Helumo Subdistrict of the South Bolaang Mongondow District. the research method used is qualitative. The data collection used is observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study are: 1) the level of political participation has differences, namely the level of public participation is less in 2015, but more increased in 2020, and 2) the factors that cause the increased public participation in the elections in Helumo Subdistrict, South Bolaang Mongondow is the strong hope of the community towards a pro-people leader.

Keywords: political participation, regional election



ABSTRAK

SUPRANDI AIYADI. S2117046. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DIKECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Peneitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2020-2025 di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2) menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2020-2025 di Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) tingkat partisipasi politik memiliki perbedaan, yaitu tingkat partisipasi masyarakat kurang pada tahun 2015, tetapi lebih meningkat pada tahun 2020, dan 2) faktor yang menyebabkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah adanya keinginan masyarakat yang sangat besar terhadap pemimpin pro-rakyat.

Kata kunci: partisipasi politik, pilkada





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3305/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Suprandi Ayadi
NIM : S2117046
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KANTOR KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Judul Penelitian : PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH DI KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 20 Maret 2021

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KECAMATAN HELUMO

Jln. Trans sulawesi Desa Duminanga Kec. Helumo Tlp/Fax. 0434-2629451 kode pos 95779

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

No: 470/Kec.Helumo/374/IIV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala kecamatan Helumo kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menerangkan bahwa:

Nama : SUPRANDI AIYADI
Nim : S2117046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas Benar telah melaksanakan penelitian di kecamatan Helumo kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mulai tanggal 8 juni sampai 15 juni tahun 2020, dengan judul penelitian "**partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kecamatan Helumo kabupaten bolaang mongondow selatan**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Di keluaran di, Helumo

Pada tanggal, 4 juni 2021

Camat Helumo



NOLDI TANGAHU, SH

NIP. 19851020 201001 1 013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0859/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SUPRANDI AIYADI
NIM : S2117046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kecamatan belum kabupaten Bolaang mongondow selatan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 03 November 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_S2117046_SUPRANDI AIYADI_PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.docx

Nov 2, 2021

9246 words / 54728 characters

S2117046

SKRIPSI_S2117046_SUPRANDI AIYADI_PARTISIPASI POLITIK M...

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uin-suska.ac.id	18%
	INTERNET	
2	repository.uinbanten.ac.id	7%
	INTERNET	
3	repositorio.une.edu.pe	1%
	INTERNET	

Excluded search repositories:

None

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SUPRANDI AIYADI, lahir di Desa Bakida pada tanggal 09 agustus 1998, Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Bakida, kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Anak kelima dari pasangan bapak Amrin Aiyadi dan ibu Tasmin

Mohamad. Penulis memulai pendidikan di SDN 01 Bakida pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP 3 Bakida Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan ke SMK N 01 Posigadan pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun 2017 penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di perguruan Tinggi yaitu di Universitas Icshan Gorontalo pada program studi Ilmu Pemerintahan.